



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

<http://kliping.dpr.go.id>

Judul	: Viva Yoga Mauladi, Wakil Ketua Umum PAN: Ide Dasarnya Supaya Pemilu Lebih Murah
Tanggal	: Senin, 21 Februari 2022
Surat Kabar	: Rakyat Merdeka
Halaman	: 2

VIVA YOGA MAULADI
Wakil Ketua Umum PAN

Ide Dasarnya Supaya Pemilu Lebih Murah

“

Ide dasar pemilu serentak adalah efektivitas dan efisiensi. Efisiensi dalam arti anggaran dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, jadi murah. Efektif dalam arti, masyarakat tidak fokus pada proses elektoral terus.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengusulkan anggaran Rp 86 triliun untuk pemilu nasional, dan Rp 26 triliun untuk pilkada. Besarnya anggaran ini, menuai kritik. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra kemudian menjawab kritik tentang besarnya anggaran Pemilu 2024. Ilham mengaku tidak masalah anggaran yang dimiliki terlalu besar itu, dirasionalisasikan kembali. Namun, ia berharap, apa yang KPU periode ini upayakan, dapat direalisasikan. “Semoga yang kita upayakan bersama, bisa diputuskan, karena

KPU periode berikutnya membutuhkan kepastian untuk menyukkseskan Pemilu dan Pilkada 2024,” tuturnya. Untuk itu, lanjut Ilham, Sekjen KPU telah berkoordinasi dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR. Menurutnya, kebutuhan anggaran yang besar ini, bagian dari komitmen KPU untuk mengembangkan sarana dan prasarana KPU di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Apalagi, masih banyak kantor KPU di daerah yang pinjam atau mengontrak. “Masih dipinjamkan Pemda dan masih ngeontrak di beberapa



ruko di daerah-daerah tertentu,” katanya saat peluncuran Hari Pemungutan Suara Pemilu Serentak 2024 di kantor KPU, Jakarta, Senin (14/2). Menurut Ilham, KPU butuh sarana dan prasarana lebih baik untuk menyukkseskan Pemilu 2024. Selain untuk kantor KPU, dia menyatakan, anggaran yang tinggi karena KPU ingin menambah honor petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). “Kami ingin honor petugas badan ad hoc dinaikkan,” tandas Ilham. Berikut wawancara dengan Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi mengenai hal ini.

Bagaimana tanggapan Anda terhadap anggaran pemilu ini?

Ide dasar pemilu serentak adalah efektivitas dan efisiensi. Efisiensi dalam arti anggaran dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, jadi murah. Efektif dalam arti, masyarakat tidak fokus pada proses elektoral terus. Makanya, pemilu dan pilkada ditaksanakan secara serentak. Kalau setiap minggu berpikir elektoral, akan berpengaruh pada kondisi ekonomi, sosial, budaya dan politik.

Apa tujuannya?

Efisiensi itu menekan anggaran. Efektivitas itu menebak konflik sosial politik.

Apakah naiknya anggaran pemilu menyalahi ide dasar keserentakan?

Anggaran selalu meningkat. Pemilu serentak itu dilakukan pada 2014. Ketika itu, pada 2014 anggaran meningkat 61 persen. Sekarang, meningkat lagi. Jadi, pemilu serentak itu mengingkari ide dasarnya. Yakni, efisiensi dan efektivitas.

Anggaran naik, antara lain karena naiknya honor petugas. Pendapat Anda?

Iya, anggarannya meningkat karena naiknya honor atau gaji penyelenggara.

Sebaiknya bagaimana?

KPU harus melibatkan kekuatan *civil society*, yaitu kekuatan masyarakat, LSM dan kelompok-kelompok untuk ikut bertanggung jawab terhadap pemilu.

Para petugas pemilu, dari KPPS, PPS dan PPK, jangan berorientasi uang, untuk mencari kerja. Pola pikirnya adalah tanggung jawab agar pemilu berintegritas, jujur, adil dan meningkatkan kualitas demokrasi.

Apa maksud Anda jangan berorientasi uang?

Jangan menjadi petugas hanya untuk mendapatkan uang, atau berperilaku curang untuk mendapatkan uang sognakan. Mereka di situ untuk menjaga demokrasi yang berkualitas, untuk membangun integritas.

Bagaimana caranya agar para petugas tidak berorientasi uang?

Perlu pendekatan, kesadaran politik dan pendidikan. Pendekatan begitu, sekarang ini kurang. Pendekatannya pun serba material. Yakni, petugas dapat gaji sekian, diharapkan dapat mengawal pelaksanaan pemilu.

Pada hal, berapa pun honor yang dibebankan tidak serta merta menghasilkan pemilu yang berkualitas apabila niatnya, perlakunya, tindakannya, motivasinya tidak dibenarkan dulu.

Maksud Anda?

Tidak serta-merta kenaikan honor PPS, PPK dan KPPS menghilangkan kecurangan dan penyimpangan serta moral hazard.

Soal anggaran untuk tunjangan kematian, bagaimana pandangan Anda?

Saya setuju adanya tunjangan kematian. ■ REN